IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 16 TAHUN 2015 DALAM PENYELESAIAN MASALAH PENGEMIS DI KRUMPUT DESA PAGERALANG KABUPATEN BANYUMAS

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 16 YEAR 2015 IN SOLVING THE BEGGARS PROBLEM IN KRUMPUT PAGERALANG BANYUMAS

Oleh : Ari Handayani dan Francisca Winarni, M.Si., FIS, UNY,
ari_handayanixa@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda No. 16 Tahun 2015 dalam penyelesaian masalah pengemis di Krumpit Desa Pageralang Kabupaten Banyumas, serta untuk mengetahui faktor penghambatnya. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Perda No. 16 Tahun 2015 belum baik, dilihat dari tiga variabel. Variabel pertama, karakteristik masalah yang ada di Krumpit sangat kompleks, tingkat kemajemukan kelompok sasaran heterogen, proporsi kelompok sasaran kebijakan hampir seluruh warga, dan kebijakan yang dibuat ditujukan untuk mengubah sikap dan perilaku. Variabel kedua, karakteristik kebijakan belum jelas dan bersifat umum, belum adanya komitmen aparat. Variabel ketiga, variabel lingkungan yang tidak mendukung proses implementasi, lingkungan sosial tidak aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pengemis di Krumpit. Kemudian faktor penghambat implementasi Perda ini, yaitu faktor internal adanya mitos yang dipercaya di Krumpit, tingkat komitmen aparatur yang rendah. Faktor eksternal, kesalahpahaman dari pelembar uang yang menganggap pengemis disana merupakan orang yang kurang mampu.

Kata kunci: Implementasi Perda, Pengemis di Krumpit

ABSTRACT

This research was aimed at finding out the implementation of regional regulation number 16 year 2015 in solving the beggars problem in Krumpit Pageralang Banyumas including the inhibiting factors. The research design was descriptive qualitative. The results showed the implementation of the regional regulation number 16 year 2015 based on three variables from Mazmanian and Sabatier that was not good yet. The first variable, the problem characteristic in Krumpit was very complex in a long time, the diversity of target group behavior was heterogeneous, the target group was almost people in the population, and the policy which was created was aimed to change behavior. The second variable, the policy characteristic, the content of the policy was not clear and too general, it did not show the commitment of the implementing officials to solve the beggars problem. The third variable, the environmental variable did not support the implementation, the community did not participate in solving the beggars problem in Krumpit. Then, the inhibited factors of the implementation of the regional regulation number 16 of 2015 were the internal factors consisting of myths which were believed in Krumpit and the low commitment of the implementing officials. The external factor was the misconception of the people who gave the beggars money as they thought that the beggars were poor.

Keywords: implementation of regional regulation, beggars in Krumpit

PENDAHULUAN

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki permasalahan sosial yang tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Soerjono Soekanto (2012:331) masalah sosial dapat muncul jika terjadi penyimpangan perilaku terhadap aturan sosial, ataupun nilai dan norma sosial. masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan norma.

Menurut Ketua Forum Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di wilayah Banyumas, Sutoyo PD, Rabu (9/2) "Banyumas masuk urutan permasalahan kesejahteraan sosial yang tinggi, yaitu lima besar di Jawa Tengah dibanding kabupaten lain," Salah satu daerah di Kabupaten Banyumas, yang memiliki permasalahan terkait pengemis yaitu daerah Krumpit, di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

Krumpit merupakan sebutan untuk daerah perkebunan karet yang merupakan milik PTPN (PT Perusahaan Nusantara) IX yang ada di desa Pageralang. Pengemis yang ada di daerah Krumpit ini terjadi karena sudah membudaya dan menjadi kebiasaan. Menurut Ali (2013:3) budaya di dalam mengemis memiliki tiga indikator yaitu etnografis, sosialisasi dan *modus operandi* (bentuk mengemis). Hal ini sesuai dengan keadaan pengemis yang ada di Krumpit, yang mana dari sisi etnografis

masyarakat menganggap bahwa kegiatan mengemis di Krumpit merupakan suatu hal yang biasa terjadi, dan bukan merupakan hal yang buruk. Dari sisi sosialisasi, penanaman nilai mengemis terjadi sejak usia anak-anak karena dibawa untuk melakukan kegiatan mengemis. *Modus operandi/* bentuk mengemis yang ada di Krumpit ini mudah untuk dilakukan yaitu hanya duduk di tepi jalan.

Fenomena ini berawal karena adanya mitos mengenai melempar koin di daerah Krumpit agar terhindar dari marabahaya bagi pengendara yang akan melewati jalan raya Krumpit. Di daerah Krumpit terdapat jalan raya yang berkelak-kelok dan menanjak, jalan ini menembus perbukitan Krumpit dan merupakan akses utama lalu lintas dari Yogyakarta atau Jakarta yang melewati jalur selatan untuk mencapai Purwokerto dan sejumlah daerah lain di Jawa Tengah bagian barat dan utara. Ada suatu kepercayaan yang sudah membudaya secara turun temurun, bahwa setiap melewati jalan Krumpit harus memberi sesajen untuk keselamatan. Hal ini didukung dengan banyaknya kasus kecelakaan yang sering sekali terjadi di daerah ini. Adanya kejadian seperti ini masyarakat sepakat untuk melakukan/memberi *sesajen*, bagi para pengguna jalan yang melewati Daerah Krumpit. Namun seiring berjalannya waktu hal ini dianggap kurang efisien, akhirnya sesajen ini di ganti

dengan melakukan pelemparan uang, sebagai pengganti *sesajen* yang biasa dilakukan.

Fenomena kebiasaan melempar uang ketika melewati jalan raya Krumput membuat di sepanjang tepi jalan raya Krumput terdapat banyak uang yang berserakan. Uang-uang ini kemudian dipunguti oleh orang-orang dan warga sekitar. Hal inilah yang mendorong sebagian besar masyarakat Pageralang memungut uang sesajen tersebut, dan disertai dengan usaha meminta-minta. Pengemis di daerah Krumput Pageralang terdiri dari berbagai usia, ada yang sudah renta, remaja, orang tua hingga anak usia sekolah, ada juga bayi-bayi yang dibawa atau di gendong oleh orang tuanya dengan duduk di atas batu-batu sambil memegang payung. Upaya ini dilakukan untuk lebih menarik perhatian dan belas kasih dari para pengendara yang melewati daerah ini.

Salah satu jalan untuk dapat mengatasi permasalahan pengemis yaitu, dengan cara membuat suatu peraturan atau kebijakan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pengemis. Menurut Edi Suharto (2014:6) kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip – prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan wujud dari kebijakan publik yang

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan fenomena dan kondisi di tiap daerah masing-masing. Peraturan Daerah (Perda) No 16 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat merupakan salah satu kebijakan publik yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai penyakit masyarakat, salah satunya tentang pengemis. Perda Nomor 16 tahun 2015 didalamnya memuat tentang larangan melakukan kegiatan mengemis/ mengamen dengan cara maupun alat apapun, setiap orang/ badan dilarang memberikan uang atau barang kepada pengemis. Perda ini juga memuat sanksi yang ditujukan kepada pemberi maupun pengemis yaitu berupa kurungan paling lama tiga bulan, dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Akan tetapi dalam pelaksanaan Perda No 16 tahun 2015 masih ada permasalahan, baik penolakan dari para pengemis maupun dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dari adanya Perda tersebut. Sanksi yang diberikan kepada orang/ lembaga yang memberikan uang/barang dalam bentuk apapun terhadap gelandangan, pengamen, anak jalanan dan orang terlantar, serta sanksi bagi penerimanya tentu saja diharapkan memberi dampak berkurangnya PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar).

Pelaksanaan dari kebijakan merupakan suatu hal yang penting guna tercapai tujuan

dari di bentuknya kebijakan tersebut. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21), implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya tujuan kebijakan.

Namun Keberadaan Perda No 16 tahun 2015, menimbulkan pro dan kontra. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti memfokuskan penelitian pada implementasi Perda Nomor 16 tahun 2015 dalam penyelesaian masalah pengemis di Daerah Krumpud Desa Pageralang Kabupaten Banyumas.

Dalam penelitian ini untuk mengukur keberhasilan implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2015 dalam penyelesaian masalah pengemis di Krumpud, menggunakan teori dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: 1) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), 2) Karakteristik kebijakan/ undang-undang (*ability of statue to structure implementation*), 3) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Teori Mazmanian dan Sabatier dipilih karena variabel yang ada di teori ini sesuai untuk menganalisis implementasi Perda di Krumpud yang memiliki permasalahan

yang unik. Sehingga dapat membantu dalam proses penelitian.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif adalah menjelaskan dan mendeskripsikan realita di lapangan secara empiris sehingga fenomena yang di teliti dapat di analisis secara lebih mendalam, rinci, dan menjawab rumusan masalah terkait implementasi perda nomor 16 tahun 2015 dalam penyelesaian masalah pengemis di Krumpud Desa Pageralang Kabupaten Banyumas.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pageralang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena terdapat daerah Krumpud yang merupakan tempat para pengemis sejak zaman dahulu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2017 sampai dengan Februari 2018.

Subjek Penelitian

Bapak Jumanto, Kepala Desa Pageralang, bapak Hendarto, Pegawai bidang perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial, Dinsospermasdes, bapak Kasmu, pegawai bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban, Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP) bapak Sohari, warga Desa Pageralang, ibu Suratmi, pengemis yang ada di Krumput Desa Pageralang, bapak Tono, Pengendara yang melewati daerah Krumput.

Data dan Sumber Data

Data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian dan observasi terkait dengan implementasi Perda No. 16 Tahun 2015 dalam penyelesaian masalah pengemis di Krumput, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang didapat di lokasi penelitian.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama didalam penelitian ini merupakan peneliti. Disamping peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini, terdapat instrumen lainnya yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi, buku catatan, alat perekam dan kamera.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan. Peneliti melakukan pengamatan terkait dengan implementasi Perda No. 16 Tahun 2015 dalam penyelesaian masalah pengemis di Krumput.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur artinya wawancara bebas

dimana peneliti tidak melakukan wawancara dengan pedoman wawancara yang sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumen internal yang digunakan adalah: Profil Desa Pageralang, profil kantor Dinsospermasdes, dokumen rencana kerja bidang Transtibun Satpol PP Kab. Banyumas, dokumen program dan kegiatan Dinsospermasdes Tahun 2016. Dokumen eksternal yang digunakan peneliti adalah: Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015, media massa dan sumber lain berupa jurnal hasil penelitian.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yang berarti teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melihat keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 dalam

penyelesaian masalah pengemis di Krumpit Desa Pageralang, menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, terdapat 3 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu (1) karakteristik masalah (*tractability of the problems*), (2) karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), (3) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Implementasi kebijakan Perda No 16 Tahun 2015 dilihat dari karakteristik dari masalah.

Jika melihat dari karakteristik masalah yang ada dalam implementasi Perda No. 16 Tahun 2015, untuk menyelesaikan permasalahan mengemis di Krumpit, memiliki permasalahan yang kompleks. Tingkat kesulitan teknis yang dihadapi, merupakan masalah yang sulit untuk di pecahkan. Mengingat hal ini sudah berlangsung sejak lama, dan dilakukan secara turun temurun. Hal ini sesuai dengan klasifikasi masalah sosial berdasarkan sumbernya menurut Soekanto (2012:315) yaitu masalah sosial dapat timbul karena faktor ekonomi, biologis, biopsikologis dan kebudayaan. Masalah pengemis di Krumpit bersumber dari kebudayaan, hal ini sudah dilakukan sejak lama dan turun temurun.

Kemudian tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran yang heterogen. Terdiri dari berbagai tingkat usia, mulai dari balita, anak-anak, orang dewasa, dan lansia. Proporsi kelompok sasaran dari kebijakan, hampir mencakup seluruh warga Pageralang, Bahkan ada yang dari desa sebelah, seperti Desa Karangrau yang ikut melakukan kegiatan mengemis di daerah Krumpit. Hal ini sesuai dengan penelitian Arzena Devita Sari (2015), mahasiswa universitas Airlangga, dengan judul penelitian "Pelembagaan Perilaku Mengemis di Kampung Pengemis" hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sulit untuk menghilangkan kebiasaan mengemis karena kegiatan ini dilakukan oleh seluruh warga. Sedangkan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan sulit dilakukan, mengingat kebijakan yang dibuat, bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan.

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan sosial menurut Soetomo (2013:33) dikenal dengan 3 tahap yaitu identifikasi, diagnosis dan *treatment*. Variabel karakteristik masalah dalam proses implementasi Perda No. 16 Tahun 2015 dalam penyelesaian masalah pengemis perlu untuk diperhatikan. Jika melihat dari pendapat Soetomo maka variabel karakteristik masalah masuk kedalam tahap diagnosis dan identifikasi. Tahap

identifikasi dilakukan untuk membuka kesadaran bahwa dalam kehidupan masyarakat terkandung masalah sosial. sedangkan tahap diagnosis sebagai upaya untuk mencari dan mempelajari latar belakang masalah, faktor yang terkait dan faktor yang menjadi penyebab/ sumber masalah.

Maka untuk dapat mengimplementasikan Perda No. 16 Tahun 2015 dalam penyelesaian masalah pengemis di Krumpt, jika dilihat dari variabel karakteristik masalah akan sulit dilakukan. Karena masalah yang terjadi merupakan permasalahan yang sangat kompleks.

Implementasi kebijakan Perda No 16 Tahun 2015 dilihat dari karakteristik kebijakan.

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan pengemis di Krumpt Desa Pageralang, karakteristik kebijakan masih belum jelas, jika untuk dapat mengatasi pengemis di Krumpt, apa yang ada didalamnya masih bersifat umum, pengemis yang dimaksud dalam Perda ini masih pengemis secara keseluruhan, sedangkan pengemis yang ada di Krumpt ini memiliki ciri khas, dan latar belakang tersendiri. Alkosar (1984: 120-121) faktor penyebab adanya pengemis yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu malas bekerja, mental yang

tidak kuat, tidak mau bekerja, cacat fisik dan cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor ekonomi, geografi, pendidikan. Pengemis di Krumpt terjadi karena faktor internal seperti sikap mental dan kepercayaan.

Agar permasalahan pengemis di Krumpt bisa di selesaikan/dikurangi seharusnya kebijakan disesuaikan dengan permasalahan, agar tujuan dari kebijakan yang ada dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan pengertian kebijakan menurut Edi Suharto (2014:6) kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Perda seharusnya dibuat dan disesuaikan dengan kondisi permasalahan di tiap daerah masing-masing akan tetapi Perda No. 16 Tahun 2015 masih bersifat umum. Hal ini membuat perda ini kurang sesuai atau boleh saya bilang tidak mempan untuk menangani permasalahan pengemis yang ada di krumpt.

Jika melihat dari koordinasi antara vertikal dan horisontal, menurut saya tidak ada masalah, mengingat tiap instansi mengerti dan memahai Tupoksi masing-masing. Akan tetapi komitmen aparat untuk menyelesaikan permasalahan di Krumpt belum ada, karena permasalahan di Krumpt ini masih belum mendapatkan perhatian yang besar. Koordinasi,

komunikasi serta komitmen aparat memang sangat penting dalam proses implementasi. Hal ini sesuai dengan Laster dan Stewart (Winarno, 2002: 101-102) yang menjelaskan, implementasi merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama guna memperoleh tujuan yang diinginkan. Implementasi menurut Purwanto dan Sulistyani (2012:12) implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran. Akan tetapi anggaran yang ada belum dialokasikan untuk membuat program khusus guna menangani masalah yang ada di Krumput. program-program yang ada hanya untuk pengemis secara umum, yang didominasi karena latar belakang ekonomi. Sehingga program yang ada tidak bisa menjangkau pengemis yang ada di Krumput. Selanjutnya terkait keterbukaan terhadap partisipasi kelompok-kelompok luar untuk dapat berpartisipasi, sudah dilakukan walaupun belum ada tanggapan yang baik terkait partisipasi ini.

Variabel karakteristik kebijakan ini penting untuk di pelajari hal ini sesuai dengan pendapat Sotomo (2013:33) dalam tahap diagnosis dalam upaya penyelesaian masalah sosial terdapat Pendekatan *personal blame aproach*, yaitu mencari

sumber masalah pada level individu baik faktor psikis, fisik, maupun sosialisasinya. Karakteristik kebijakan yang masih bersifat umum, serta komitmen aparat pelaksana dalam menangani permasalahan pengemis di Krumput masih kurang. Hal ini membuat implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2015 sulit dilakukan, untuk dapat menyelesaikan permasalahan pengemis yang ada di Krumput.

Implementasi kebijakan Perda No 16 Tahun 2015 dilihat dari variabel lingkungan.

Jika dilihat dari variabel lingkungan kebijakan, Kondisi ekonomi para pengemis sudah baik, dan bukan termasuk kedalam RTM (Rumah Tangga Miskin). Hasan dalam Aswanto (1996:9-10) membagi jenis pengemis menjadi 2 yaitu pengemis membudaya dan pengemis karena terpaksa. Hal ini sesuai dengan pengemis di Krumput bukan karena latar belakang ekonomi, menurut Hasan pengemis membudaya yaitu seseorang yang menjadi pengemis bukan karena keadaan perekonomiannya yang sulit, tetapi karena pekerjaan sebagai seorang pengemis telah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sedangkan dukungan publik terhadap implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2015, dalam penyelesaian masalah

pengemis di Krumpu desa Pageralang masih kurang. Masyarakat cenderung membiarkan kegiatan mengemis di Krumpu. Tingkat komitmen, ketrampilan aparat dan implementor masih belum maksimal, karena daerah krumpu belum mendapat perhatian yang besar, dilihat dari program-program penyelesaian pengemis masih bersifat umum dan kebanyakan hanya di terapkan di kota seperti Purwokerto.

Jika dilihat dari upaya penanganan masalah sosial menurut Soetomo (2013:33) maka variabel lingkungan ini masuk kedalam tahap diagnosis yaitu *system blame aproach* yaitu mencari sumber masalah sosial pada level sistem yang ada, melihat aspek-aspek struktur sosial, institusi sosial, fungsi dari berbagai sistem sosial, kemampuan sistem sosial dalam merespon perubahan sosial. lingkungan dan sistem sosial yang ada sudah terbentuk/terpengaruh oleh kebudayaan/kebiasaan mengemis di Krumpu untuk dapat menerimadi lingkungan sosial.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dilihat dari karakteristik lingkungan, belum mendukung proses implementasi Perda No. 16 Tahun 2015 dalam penyelesaian masalah pengemis di Krumpu, Desa Pageralang.

Hambatan implementasi Perda No 16 Tahun 2015 dalam penyelesaian masalah pengemis di daerah Krumpu, Desa Pageralang.

Faktor penghambat implementasi Perda No. 16 Tahun 2015 dalam penyelesaian masalah pengemis di Krumpu yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang menghambat proses implementasi Perda ini, dalam penyelesaian masalah pengemis di Krumpu adalah faktor dari para aparat/implementor yang melaksanakan, dimana tingkat komitmen untuk dapat benar-benar menyelesaikan permasalahan di Krumpu ini kurang. Bahkan program-program yang dibuat belum ada yang khusus untuk menangani pengemis di Krumpu.

Faktor eksternal yaitu dari para pengemis yang ada di Pageralang. Mereka melestarikan kegiatan mengemis di Krumpu. akan tetapi mereka disebut sebagai pengemis. Kebanyakan orang yang lewat mengira mereka memang orang tidak punya dan karena rasa iba mereka melemparkan uang.

Fredrerich (Muchlis Hamdi 2014:37) bahwa kebijakan yang ada dalam lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai tujuan. maka hambatan

implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2015 dalam penyelesaian masalah pengemis di Krumpt Desa Pageralang yaitu dari faktor internal, eksternal dan kesalahpahaman antara pemberi uang dengan pengemis. Untuk dapat terlaksana proses implementasi yang baik maka hambatan yang ada harus diselesaikan dan diatasi dengan berbagai cara.

Soetomo (2013: 33) tahap ketiga atau terakhir dari upaya penyelesaian masalah sosial adalah *Treatment* yaitu pemecahan masalah sosial di dasari oleh tahap diagnosis yang merupakan tahap mencari dan mempelajari masalah, kemudian tahap *treatment* ini akan menghapus atau menghilangkan masalah. Sehingga hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi Perda No. 16 Tahun 2015 dalam penyelesaian masalah pengemis di Krumpt baik faktor internal maupun eksternal perlu untuk diidentifikasi yang kemudian sebagai dasar untuk *treatment* upaya pemecahan masalah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian data dan pembahasan maka peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi Perda No. 16 Tahun 2015 dilihat dari tiga variabel menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier belum baik. Variabel pertama,

karakteristik masalah, masalah yang ada di Krumpt sangat kompleks, kegiatan mengemis di Krumpt sudah berlangsung lama dan turun-temurun, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran yang heterogen dari berbagai tingkat usia, proporsi kelompok sasaran kebijakan yang hampir seluruh warga Desa Pageralang, dan kebijakan yang dibuat ditujukan untuk mengubah sikap dan perilaku. Variabel kedua, karakteristik kebijakan, isi kebijakan yang ada belum jelas dan masih di tujukan kepada pengemis secara umum, belum adanya komitmen aparat untuk dapat menyelesaikan permasalahan pengemis mengingat belum ada program khusus untuk penanganan masalah ini. Variabel ketiga, variabel lingkungan, lingkungan yang tidak mendukung proses implementasi yang mana kondisi ekonomi pengemis yang bukan Rumah Tangga Miskin (RTM) sehingga program untuk pengemis sulit di terapkan, lingkungan warga masyarakat Pageralang, maupun masyarakat secara umum tidak aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pengemis di Krumpt. Mereka sudah terbiasa dengan adanya fenomena tersebut. Kemudian faktor penghambat implementasi Perda No. 16 Tahun 2015, yaitu faktor internal adanya mitos yang dipercaya di Krumpt, tingkat komitmen aparat yang rendah. Faktor eksternal, adanya kesalahpahaman dari pemberi/

pelempar uang yang menganggap pengemis disana merupakan orang yang kurang mampu.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu membuat program kusus untuk pengemis di Krumput. Seperti pemasangan pamflet dilarang membuang uang di daerah ini atau penilangan/ denda bagi pengendara yang memberikan uang/ melempar uang.
2. Perlu adanya peningkatan razia yang intensif dan berkelanjutan, jangan hanya pada hari atau kondisi tertentu saja.
3. Penegakan hukum yang tegas terhadap pengemis maupun pemberi uang.
4. Perlu di buat Perda Khusus yang sesuai dengan permasalahan pengemis di Krumput berupa Perdes (Peraturan Desa).
5. Perlu adanya reward/penghargaan bagi desa yang bebas atau memiliki jumlah pengemis yang sedikit. Guna menambah semangat baik aparatur desa maupun warga untuk dapat menyelesaikan permasalahan pengemis yang ada.
6. Perlu adanya pendekatan secara rohani, mislanya ceramah/ pengajian terkait ahwa kegiatan mengemis merupakan kegiatan yang tidak baik

7. Lokasi tepi jalan krumput perlu di buat pagar pembatas jalan yang tinggi atau tanggul pembatas jalan supaya pengemis tidak dapat lagi duduk-duduk di tepi jalan Krumput.
8. Perlu adanya komitmen dan kerjasama antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan pengemis di Krumput.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dimas.(2013).*Pengemis Undercover*. Jakarta:Titik Media Publisher
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisi, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Isslamy, M.I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kusumanegara,S.(2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan publik*.Yogyakarta: Gava Media
- Musthafah, L dkk.2000. *Ilmu Budaya Dasar*. Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri
- Nonugroho, S. (1987).*Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Hanindita Offset
- Prasetya, J.T dkk. (1998). *Ilmu Budaya Dasar*.1998.Jakarta: PT Rineka Cipta
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.Jakarta: A r-Ruzz Media

- Siagian, S.P.(2012).*Manajemen Strategik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soetomo.(2013).*Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A.G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Terori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. (2010). *Dasar -Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto,E.(2014).*Analisis Kebijakan Publik*.Bandung: Alfabeta
- Sujarwa.(2014). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sujianto.(2008).*Iplementasi Kebijakan Publik Konsep dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Sulaiman, M. (2012). *Ilmu Budaya Dasar*.Bandung: PT Refika Aditama.
- Tangkilisan, Hesel. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Wibawa, S. dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo
- Widagdho, J. dkk. (2010). *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Perssindo
- Humaidy, M.A.A .(2003). *Thesis: Sosialisasi Nilai Pada Pada Komunitas Pengemis (Studi Kasus di Desa Pragaan Daya Sumenep Madura)*. FISIP Universitas Indonesia.
- Studi Deskriptif Pengemis di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep*. Universitas Airlangga

Jurnal, Tesis dan Skripsi:

- Devita, A .(2015). *Pelebagaan Perilaku Mengemis di Kampung Pengemis*